

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 2005-2008 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN

***(The Impact of Government Policy of Presidential Instruction in
2005-2008 for Rice Policy on Food Security)***

**Surya Abadi Sembiring¹⁾, Harianto²⁾,
Hermanto Siregar²⁾, dan Bungaran Saragih²⁾**

ABSTRACT

The objectives of this research is to analyze the impacts of rice policy on the food security and on producer and consumer surplus. The research used time series data. The data was a monthly time series from March 2005-September 2009. Rice policy model specification uses the simultaneous equations consisting of 15 structural equations and 11 identity equations which was estimated using Two Stages Least Squares (2SLS) method. The results show that: (1) the increase of the government purchases price of dried harvest paddy by 15 percent improve food security whereas retail rice price decrease makes producer and consumer surplus increase, and (2) the increase of the ceiling retail price of NPK fertilizer by 15 percent gave a negative impact on food security whereas retail rice price increase makes a negative effect to consumer surplus. Food security would be achieved if the government purchase on dried harvest paddy is implemented accordingly.

Key words: presidential instruction for national rice policy, food security, producer and consumer surplus

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 2005-2008, pemerintah mengeluarkan lima Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kebijakan Perberasan, yaitu No 2 Tahun 2005, No 13 Tahun 2005, No 3 Tahun 2007, No 1 Tahun 2008 dan No 8 Tahun 2008. Tujuan kebijakan perberasan pada Inpres tersebut, adalah peningkatan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, dan stabilisasi ekonomi dan ketahanan pangan. Merujuk Sawit (2009), dasar pertimbangan menetapkan kebijakan dimasukkan sebagai tujuan kebijakan perberasan.

Dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan Inpres adalah karena perkembangan perekonomian nasional, perkembangan nasional dan global di bidang pangan, khususnya perberasan. Kondisi tersebut dikemukakan antara lain oleh Suryana dan Murdianto (2001); Simatupang (2001); Pranolo (2001); Sawit (2001), (2007); Saragih (2001), yaitu (1) pasar beras dunia hanya sekitar 4-5% dari total produksi dunia sehingga tidak dapat diandalkan sebagai pengadaan beras domestik, (2) beras sebagai bahan makanan pokok, (3) kondisi *excess supply* pada musim panen raya yang merugikan produsen dan musim paceklik

¹⁾ Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Katolik St. Thomas Medan

²⁾ Departemen Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

yang merugikan konsumen, (4) perubahan lingkungan strategis domestik, dengan berlangsungnya proses desentralisasi dan otonomi daerah, dan (5) pergerakan harga gabah antarmusim. Kelima kondisi di atas secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Sumber ketahanan pangan tidak bisa mengandalkan produksi beras dunia, sedangkan peranan komoditi beras sebagai komoditi strategis dan politis mendorong pemerintah serius mempertahankan ketahanan pangan. Di sisi lain, pengaruh perubahan iklim, perubahan pangan (*food*) ke pakan (*feed*) di negara maju, perubahan dampak *global excess demand* menjadi *global excess supply* secara signifikan akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Suryana dan Swatika (1997) menyimpulkan konsep ketahanan pangan dari studi terdahulu, seperti Soetrisno (1996), Andersen (1994), Sukirman (1996), dan Suhardjo (1996) sebagai pangan yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dengan kualitas yang memadai pada waktu dan tepat, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. United States Departement of Agriculture (1996) menyebutkan ketahanan pangan terdiri dari tiga dimensi, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), dan manfaat (*utilization*).

Menurut Simatupang (2007), kerangka pikir pemerintah dalam merancang kebijakan ketahanan pangan ialah (1) harga yang "terjangkau" dan stabil cukup untuk menjamin bahwa semua konsumen akan dapat memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan hidupnya, (2) tingkat harga di konsumen merupakan refleksi dari kecukupediaan pangan, (3) stabilisasi harga beras pada tingkat yang "terjangkau" cukup untuk menjamin ketahanan pangan, (4) produksi domestik merupakan sumber pengadaan yang paling handal untuk menjamin kecukupediaan pangan, dan (5) oleh karena itu, swasembada pangan merupakan strategi yang paling efektif untuk kebijakan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

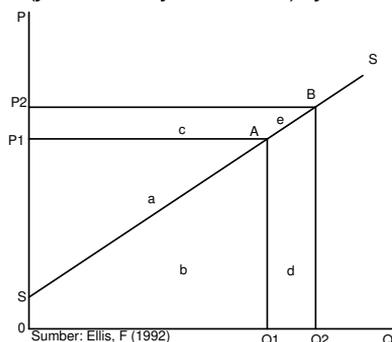
Pemerintah menetapkan instrumen untuk mencapai ketahanan pangan. Di sisi lain, pemerintah menghadapi kendala mengimplementasikan instrumen karena keterbatasan informasi dan kemampuan pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi pelaku birokrat (Hilman, 2003). Kendala yang dihadapi petani sebagai pelaku kebijakan adalah keterbatasan sumber daya lahan, modal, infrastruktur irigasi, dan teknologi khususnya pascapanen.

Perumusan permasalahan adalah bagaimana dampak kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan terhadap ketahanan pangan? Tujuan penelitiannya adalah menganalisis dampak kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan terhadap ketahanan pangan.

Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan berada pada kondisi pareto optimum jika ada pihak yang diuntungkan tanpa pihak lain dirugikan. Kebijakan perberasan yang berpihak produsen akan menguntungkan petani, sebaliknya kebijakan perberasan yang berpihak konsumen akan menguntungkan konsumen. Apabila kebijakan perberasan hanya menguntungkan produsen, tetapi merugikan konsumen atau sebaliknya, kebijakan tersebut tidak memenuhi persyaratan pareto optimum.

Solusi kebijakan perberasan yang tidak memenuhi kriteria pareto optimum dikenal dengan kriteria kompensasi, yaitu apabila terjadi perubahan karena suatu kebijakan, pihak yang diuntungkan memberi kompensasi ke pihak yang dirugikan sehingga perubahan karena kebijakan dianggap layak.

Surplus produsen adalah luasan yang berada di atas kurva penawaran dan di bawah kurva harga, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Kurva penawaran perusahaan pada pasar kompetitif adalah *marginal cost* (MC) yang berada di atas titik minimum *variable cost*. Sebelum kenaikan harga (P_1) surplus produsen, yaitu $P_1 \times Q_1$ dikurangi daerah b (jumlah biaya variabel), yaitu daerah a.



Gambar 1. Kenaikan harga dan surplus produsen

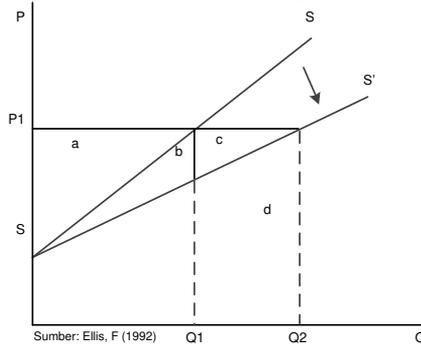
Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) melalui Inpres tentang kebijakan perberasan. Kenaikan HPP ditunjukkan dengan perubahan P_1 ke P_2 . Perubahan harga tersebut menyebabkan efek akuntansi dan efek produksi. Efek akuntansi ditunjukkan dengan perubahan surplus produsen. Kenaikan HPP menyebabkan kenaikan produksi dari Q_1 ke Q_2 sehingga surplus produsen $Q_2 \times P_2$ dikurangi daerah $b + d$, yaitu $a + c + e$ yang diperoleh dari selisih $a + b + c + d + e$ dengan $b + d$. Tambahan surplus produsen karena kenaikan harga pembelian pemerintah adalah $c + e$, yaitu selisih antara daerah $a + c + e$ (sesudah kebijakan) dengan a (sebelum kebijakan). Kurva penawaran SS inelastis menyebabkan daerah e semakin kecil dan sebaliknya kurva penawaran SS yang elastis menyebabkan luas daerah e semakin luas.

Sebelum kebijakan subsidi input, surplus produsen adalah $P_1 \times Q_1$ dikurangi daerah b (jumlah biaya variabel), yaitu daerah a . Keputusan produsen membeli input yang disubsidi pemerintah per setiap unit akan menggeser kurva penawaran S ke S' . Besarnya surplus produsen dengan adanya kebijakan subsidi input adalah $a + b + c$, yang diperoleh dari selisih daerah $a + b + c + d$ dengan d . Tambahan surplus produsen dengan kebijakan subsidi input diperoleh dari selisih antara sesudah kebijakan subsidi input dengan sebelum subsidi input, yaitu $(a + b + c) - (a)$, yaitu $b + c$, ditunjukkan pada Gambar 2.

Apabila produsen memilih berproduksi di Q_1 pada kurva S' , tambahan surplus produsen sebesar daerah b . Dengan kata lain, kebijakan subsidi input menyebabkan biaya yang dikeluarkan petani terhadap input berkurang sehingga surplus produsen naik sebesar daerah b . Kebijakan subsidi input menyebabkan output naik dari Q_1 ke Q_2 dengan asumsi harga konstan. Kenaikan output dari Q_1 ke Q_2 menyebabkan kenaikan produksi padi/beras sehingga ketahanan pangan meningkat.

Penerimaan kotor sebelum kebijakan adalah $a + b$. Tambahan penerimaan kotor karena kebijakan subsidi input lebih besar daripada tambahan biaya yang dikeluarkan sehingga tambahan output menghasilkan tambahan surplus produsen

sebesar c . Dengan asumsi kebijakan subsidi input diimplementasi sesuai dengan tujuannya, kesejahteraan produsen akan meningkat.



Gambar 2. Dampak perubahan surplus produsen dan subsidi input

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data *time series* bulanan, dari Maret 2005- September 2009. Sumber data *time series* adalah Badan Pusat Statistik, Perum Bulog, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Berdasarkan kondisi “Order” (Koutsoyiannis, 1977, Sitepu dan Sinaga, 2006), persamaan model ekonometrika kebijakan perberasan adalah *over identified*. Berdasarkan hasil identifikasi model, metode pendugaan dilakukan dengan metode 2SLS (*Two- Stages Least Squares*). Sebelum model disimulasi, dilakukan validasi model untuk melihat apakah nilai dugaan sesuai dengan nilai aktual masing-masing peubah endogen (Pindyck dan Rubinfeld, 1991). Model ekonometrika kebijakan perberasan cukup baik sebagai model pendugaan karena (1) nilai proporsi bias (U_M) yang menunjukkan kesalahan sistematis untuk mengukur tingkat penyimpangan nilai rata-rata dugaan dengan nilai rata-rata pengamatan semuanya mendekati nol, (2) nilai bias kemiringan regresi (U_R) yang menunjukkan perbedaan sudut regresi dari pengamatan dugaan mendekati nol, (3) nilai U_D mendekati satu, dan (4) terdapat 24 persamaan (93%) mempunyai nilai -Theil's lebih kecil dari 0.30.

Skenario simulasi yang dilakukan adalah menganalisis dampak kebijakan tunggal (kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dan harga eceran tertinggi pupuk NPK) terhadap ketahanan pangan. Indikator ketahanan pangan berdasarkan ketersediaan pangan, yaitu persediaan beras masyarakat, persediaan beras domestik dan surplus beras.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen 15% dengan Ketahanan Pangan

Skenario kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen 10% (S1) dan 15% (S2), kebijakan

meningkatkan harga eceran tertinggi pupuk NPK 10% (S3) dan 15% (S4). Tabel 1 menunjukkan perubahan karena dampak kebijakan tunggal yaitu S1, S2, S3 dan S4 terhadap ketahanan pangan. Skenario kebijakan S1 dan S2 menghasilkan dampak perubahan terhadap variabel endogen, tetapi tanda sama. Tanda positif menunjukkan adanya kenaikan terhadap variabel endogen, sebaliknya tanda negatif menunjukkan adanya penurunan.

Tabel 1. Dampak beberapa alternatif kebijakan tunggal pada periode bulan Maret 2005-September 2009 (%)

Variabel	Nama variabel	Satuan	Nilai dasar	S-1	S-2	S-3	S-4
LAPT	Luas areal panen	000 Ha	1.063,2	11.616	17.457	-0,329	-0,461
YPIT	Produktivitas	Ton/Ha	4.7909	0,223	0,334	-0,200	-0,288
QPIT	Produksi padi	000 Ton	5.095,1	11.902	17.907	-0,526	-0,750
QBIT	Produksi beras	000 Ton	3.209,9	11.904	17.907	-0,526	-0,751
QBLD	Beras benih/susut	000 Ton	321	11.900	17.913	-0,530	-0,748
QCBD	Persediaan beras masyarakat	000 Ton	2.888,9	11.904	17.910	-0,526	-0,751
QMBT	Jumlah beras impor	000 Ton	99.633	-25.532	-38.440	1.331	1.933
QBBT	Jumlah pengadaan beras Bulog	000 Ton	203,9	-1.128	-1.569	-1.324	-1,913
QCBB	Persediaan beras Bulog	000 Ton	1.717,7	-1.618	-2.416	-0,082	-0,116
QCBN	Persediaan beras domestik	000 Ton	4.402,7	7.232	10.880	-0,316	-0,450
QDBT	Jumlah permintaan beras	000 Ton	1.891,6	1.406	2.115	-0,053	-0,079
SDBI	Surplus beras	000 Ton	2.411,4	13.154	19.793	-0,589	-0,838
STOB	Penyaluran beras Bulog	000 Ton	205,6	-5.302	-7.928	0,097	0,146
STBF	Persediaan akhir beras Bulog	000 Ton	1.512,1	-1.118	-1.667	-0,106	-0,152
DCBP	Penyaluran beras pemerintah	000 Ton	5.5931	-37.403	-56.318	2.008	2.864
STGF	Persediaan akhir beras pemerintah	000 Ton	407,9	0,515	0,785	-0,025	-0,025
RAST	Penyaluran beras raskin	000 Ton	193,2	-4.503	-6.781	0,000	0,000
HGKPR	Harga gabah kering panen	Rp/Kg	2.285,7	7.534	11.296	0,066	0,092
TRFT	Penerimaan petani	Rp000/ha	1.0974,6	7.792	11.693	-0,139	-0,201
KAGP	Kadar air gabah kering panen	%	19,0516	0,410	0,615	0,003	0,005
HPNPR	Harga pupuk NPK	Rp/Kg	3809	-2.783	-4.177	2.533	3.633
NTPP	Nilai tukar petani padi		0,9249	11.612	17.429	-0,054	-0,076
IT	Indeks diterima petani padi		93.6093	11.527	17.189	0,098	0,140
IB	Indeks dibayar petani padi		101,3	-0,197	-0,296	0,197	0,197
HBTR	Harga beras pengecer	Rp/Kg	4.679,1	-2.693	-4.054	0,145	0,207
HPGBR	Harga beras pembelian pemerintah dari Bulog	Rp/Kg	4.478,1	-1.170	-1.762	0,065	0,092

Ketiga indikator ketahanan pangan dalam studi ini merupakan persamaan identitas. Persediaan beras masyarakat merupakan selisih produksi beras dengan jumlah beras untuk benih dan karena susut. Persediaan beras domestik merupakan selisih penambahan persediaan beras masyarakat dengan persediaan beras Bulog dikurangi terhadap jumlah pengadaan beras oleh Bulog sedangkan surplus beras diperoleh dari selisih persediaan beras domestik terhadap penambahan jumlah permintaan beras dengan jumlah beras impor.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dampak kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen sebesar 15% akan meningkatkan luas areal sebesar lebih besar dari 10%, yaitu 17,457%. Kebijakan ini akan meningkatkan produksi padi sebesar 17,907%. Produksi padi dalam bentuk gabah merupakan persamaan identitas, yaitu perkalian antara luas areal panen dengan produktivitas. Oleh karena itu, kenaikan luas areal 17,457% dan produktivitas 0,334% menyebabkan produksi padi naik sebesar 17,907%.

Produksi beras merupakan perkalian antara produksi padi dengan suatu angka konversi k sebesar 0,63. Dengan demikian, kenaikan produksi padi sebesar

17,907% menyebabkan produksi beras naik 17,907%. Peningkatan produksi beras menyebabkan kebutuhan benih dan susut naik sebesar 17,913%. Peningkatan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat naik sebesar 17,910%.

Peningkatan persediaan beras masyarakat menyebabkan persediaan beras domestik naik 10,880%. Kenaikan persediaan beras domestik karena kenaikan beras masyarakat (17,910) lebih besar daripada penurunan persediaan beras Bulog (2,416%) dan jumlah pengadaan beras oleh Bulog (1,569%). Kenaikan surplus beras sebesar 19,793% terjadi karena kenaikan persediaan beras domestik lebih besar daripada kenaikan jumlah permintaan beras (2,115%). Di sisi lain, jumlah beras impor turun 38,440%. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ketahanan pangan ditentukan oleh produksi beras dalam negeri.

Kebijakan Menaikkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk NPK 15% terhadap Ketahanan Pangan

Dampak kebijakan S3 dan S4 menghasilkan perubahan terhadap variabel endogen, tetapi tandanya sama. Oleh karena tanda sama, untuk keperluan analisis digunakan dampak kebijakan S4 terhadap ketahanan pangan. Kebijakan meningkatkan harga HET pupuk NPK sebesar 15% menyebabkan luas areal turun, tetapi penurunannya lebih kecil dari 1%, yaitu 0,461%. Kebijakan ini menyebabkan produktivitas turun lebih kecil dari 1%, yaitu 0,288%. Penurunan luas areal dan produktivitas menyebabkan produksi padi turun 0,750%. Penurunan produksi padi diikuti dengan penurunan produksi beras sebesar 0,751%. Penurunan produksi beras akan menurunkan kebutuhan benih dan susut sebesar 0,748%. Penurunan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat menurun sebesar 0,751%.

Penurunan persediaan beras domestik terjadi karena persediaan beras masyarakat berkurang 0,751%, demikian juga halnya dengan persediaan beras Bulog dan jumlah pengadaan beras oleh Bulog berkurang, masing-masing 0,116 dan 1,913%. Data di atas mengindikasikan bahwa penurunan persediaan masyarakat lebih besar dari persediaan beras Bulog dan jumlah pengadaan beras oleh Bulog. Dengan kata lain, persediaan beras domestik ditentukan oleh persediaan beras masyarakat. Seterusnya, persediaan beras masyarakat ditentukan oleh produksi beras.

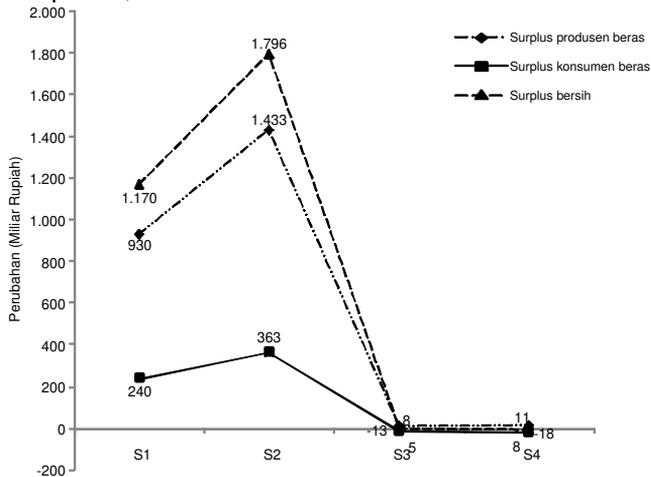
Penurunan surplus beras meskipun lebih kecil dari 1%, yaitu 0,838%, terjadi karena penurunan persediaan beras domestik dan jumlah permintaan beras masing-masing 0,450 dan 0,079%. Sebaliknya, jumlah beras impor naik lebih besar dari 1%, yaitu 1,933%. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa penurunan beras domestik akan mendorong pemerintah melakukan impor beras. Pada Diktum Kedelapan, poin 2, pada Inpres No 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan, disebutkan bahwa impor beras dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, dan atau untuk menjaga stabilisasi harga dalam negeri.

Dampak kebijakan harga output (S2) dan kebijakan subsidi input (S4) terhadap ketahanan pangan adalah (1) persediaan beras masyarakat pada S2 naik, sedangkan pada S4 turun, (2) persediaan beras domestik pada S2 naik, sedangkan pada S4 turun, (3) surplus beras pada S2 naik, sedangkan pada S4 turun, (4) harga beras pengecer pada S2 turun sehingga jumlah permintaan beras

naik, sedangkan harga beras pengecer pada S4 naik sehingga jumlah permintaan beras turun, dan (5) jumlah beras impor pada S2 turun, sedangkan pada S4 jumlah beras impor naik.

Dampak Kebijakan Tunggal terhadap Kesejahteraan

Gambar 3 menunjukkan dampak kebijakan tunggal terhadap surplus produsen beras (SPB), surplus konsumen beras (SKB), dan surplus bersih (NS). Apabila pemerintah meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dari 10 menjadi 15%, surplus produsen naik menjadi Rp 1.433 atau naik 54,19% dari skenario S1. Dengan kata lain, kebijakan S2 menghasilkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik terhadap produsen. Dampak kebijakan skenario S2 menyebabkan surplus konsumen naik menjadi Rp 363 milyar atau 51,08%. Dampak skenario S1 dan S2 menyebabkan penurunan harga beras di pasar dan diikuti dengan kenaikan surplus konsumen. Hasil studi tersebut serupa dengan hasil penelitian Sembiring (2002a dan 2002b), yang menemukan bahwa penurunan harga beras di pasar menyebabkan surplus konsumen meningkat sebesar 5,40 sampai 11,76%.



Gambar 3. Dampak kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dan harga eceran tertinggi pupuk NPK terhadap kesejahteraan

Keputusan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi pupuk NPK masing-masing 10% (S3) dan 15% (S4) menyebabkan surplus konsumen beras negatif, masing-masing Rp 13 milyar dan Rp 18 milyar. Surplus konsumen negatif terjadi karena perubahan harga beras di tingkat pengecer naik. Dampak S3 dan S4 menyebabkan kenaikan harga beras di tingkat pengecer masing-masing 0,145 dan 0,207%. Studi Hutauruk (1996) dan Mulyana (1998) menunjukkan bahwa kenaikan harga beras pengecer di pasar akan menurunkan surplus konsumen beras. Sebaliknya, skenario S3 dan S4 menyebabkan surplus produsen positif, masing-masing Rp 8 milyar dan Rp 11 milyar. Surplus produsen positif karena harga gabah kering panen naik, masing-masing 0,066 dan 0,092%. Dampak kebijakan S3 dan S4 menyebabkan harga beras di tingkat pengecer naik sehingga

surplus konsumen beras yang negatif, masing-masing Rp 13 milyar dan Rp 18 milyar.

Net surplus (NS) merupakan penjumlahan surplus produsen dengan surplus konsumen beras. Dampak kebijakan S1 dan S2 menghasilkan net surplus positif, masing-masing Rp 1.170 milyar dan Rp 1.796 milyar yang berarti skenario kombinasi kebijakan tersebut di atas berpihak kepada produsen juga konsumen. Dampak kebijakan S3 dan S4 menghasilkan net surplus negatif masing-masing Rp 5 milyar dan Rp 8 milyar, yang berarti skenario kebijakan S3 dan S4 belum mengarah kepada perbaikan karena konsumen dirugikan, sedangkan produsen diuntungkan. Dengan kata lain, kebijakan S3 dan S4 lebih berpihak ke produsen.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- (1) Peningkatan 10 dan 15% harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen berdampak positif terhadap persediaan beras masyarakat, persediaan beras domestik, dan surplus beras, dengan demikian, terjadi peningkatan ketahanan pangan.
- (2) Peningkatan 10 dan 15% harga eceran tertinggi pupuk NPK berdampak negatif terhadap persediaan beras masyarakat, persediaan beras domestik, dan surplus beras, dengan demikian menurunkan ketahanan pangan.
- (3) Kebijakan meningkatkan 10 dan 15% harga pembelian pemerintah terhadap Gabah Kering meningkatkan surplus produsen dan konsumen.
- (4) Kebijakan meningkatkan 10 dan 15% harga eceran tertinggi pupuk NPK merugikan konsumen, sebaliknya menguntungkan produsen.

Saran

Peningkatan ketahanan pangan tercapai apabila pemerintah mengimplementasikan instrumen kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dan tidak menaikkan harga eceran tertinggi pupuk NPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen PP. 1994. *World Food Trend and Future Food Security. Food Policy Report*. Washington DC: IFPRI.
- Ellis F. 1992. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hilman AL. 2003. *Public Finance and Public Policy. Responsibilities and Limitations of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koutsoyiannis A. 1977. *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods*. New York: Harper and Row Publishers Inc.

- Mulyana A. 1998. Keragaan dan permintaan beras Indonesia dan prospek swasembada menuju era perdagangan beras: suatu analisis simulasi [disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Pyndyck RS and Rubinfeld DL. 1991. *Econometric Models and Econometric Forecast*. Singapura: Mc Grow- Hill International Editional.
- Pranolo T. 2001. Pangan, Ketahanan Pangan dan Liberalisasi Perdagangan. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Saragih B. 2001. Sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada Diskusi Panel Reformulasi Kebijakan Ekonomi Beras Nasional Tanggal 17 Juli 2001, Bogor.
- Sawit MH. 2001. Kebijakan Harga Beras: Periode Orba dan Reformasi. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sawit MH. 2007. Usulan kebijakan beras dari bank dunia yang keliru. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(3): 193-212.
- Sawit MH. 2009. HPP Multi-kualitas di era surplus produksi beras: pengalaman negara lain dan gagasan buat Indonesia. Disampaikan pada Seminar Rutin Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Kementerian Pertanian. 19 November, Bogor.
- Sekretariat Kabinet. 2000. Inpres No 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Sekretariat Kabinet. 2005. Inpres No 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Sekretariat Kabinet. 2007. Inpres No 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Sekretariat Kabinet. 2008. Inpres No 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Sekretariat Kabinet. 2008. Inpres No 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Sembiring SA. 2002a. Dampak Penerapan Teknologi Baru Beras terhadap Distribusi Pendapatan. Paper disampaikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Tanggal 14-16 Mei 2002. Universitas Negeri Medan, Medan.
- Sembiring SA. 2002b. Effects of New Rice Technology on Income Distribution in North Sumatera Indonesia. In Future Scenario in Biological Research: Insights and Co-operation. Proceedings The Fourth Regional IMT-GT UNINET Conference 2002. 15-17 October 2002. Organised by School of Biological Sciences, University Sains Malaysia, Penang.

- Simatupang P. 2001. Kebijakan Harga Gabah Mengambang Terkendali Sebagai Opsi Pengganti Harga Dasar Gabah. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Simatupang P. 2007. Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(1): 1-18.
- Sitepu R dan Sinaga BM. 2006. Aplikasi Model Ekonometika: Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS [disertasi]. Bogor: Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Soetrisno N. 1996. Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Kerjasama Deptan-UNICEF di Yogyakarta 26-30 Mei.
- Suhardjo. 1996. Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Makalah disajikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Kerjasama Deptan-UNICEF di Yogyakarta 26-30 Mei.
- Suryana A dan Murdianto S. 2001. Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Suryana A dan Swatika KS. 1997. Kinerja dan Prospek Ketahanan Pangan Pokok. Silitonga, C., A.Fauzi, M.H. Sawit, P.Suharno, A.Soepanto dan M. Ismet (Penyunting) 30 Tahun Peran Bulog Dalam Ketahanan Pangan. Jakarta: Badan Urusan Bulog.
- Sukirman. 1996. Ketahanan Pangan: Konsep, Kebijakan dan Pelaksanaannya. Makalah disajikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Kerjasama Deptan-UNICEF di Yogyakarta 26-30 Mei.
- United States Departement of Agriculture. 1996. The US Contribution to World Food Security. The US Position Paper Prepared for the World Food Summit, 3 July. Washington DC: United States Departement of Agriculture.